

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, penulis akan mengulas mengenai tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran serta hipotesis. Penyusunan pada bab ini akan menyajikan tinjauan pustaka sebagai gambaran konsep dasar mengenai variabel yang akan diteliti serta dilandasi dengan adanya riset terdahulu. Selanjutnya mengulas mengenai kerangka berpikir yang memaparkan tentang model serta hubungan antara variabel bebas serta variabel terikat, kemudian disertai dengan hipotesis yang diajukan.

2.1.1 Tenaga Kerja

2.1.1.1 Pengertian Tenaga Kerja

Menurut BPS, tenaga kerja atau pekerja merupakan semua orang yang bekerja di perusahaan atau usaha tersebut. Tenaga kerja adalah bagian penting di dalam sebuah proses produksi suatu perusahaan. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun untuk masyarakat dan merupakan modal bagi bergeraknya perekonomian suatu negara.

Dari segi keahlian dan pendidikan, tenaga kerja dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu tenaga kerja kasar, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja kasar ialah tenaga kerja yang rendah pendidikan atau tidak berpendidikan dan tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang pekerjaan. Tenaga

kerja terampil ialah tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pelatihan ataupun dari pengalaman kerja, sedangkan tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup tinggi dan juga ahli di dalam bidang tertentu.

Di dalam ketenagakerjaan terdapat dua kelompok yang terdiri dari kelompok tenaga kerja dan kelompok bukan tenaga kerja, yang tergolong dalam tenaga kerja ialah mereka yang termasuk pada usia kerja dan yang tidak termasuk dalam tenaga kerja ialah mereka yang belum memasuki usia kerja. Usia kerja yang ada pada suatu negara umumnya berbeda, seperti contohnya negara Indonesia yang menetapkan batasan usia kerja minimum yaitu 10 tahun tanpa adanya umur maksimum, itu menandakan bahwa mereka yang berumur 10 tahun termasuk sebagai kelompok usia kerja. Tetapi, bank dunia juga memiliki batasan usia kerja yaitu antara 15 sampai 64 tahun.

Menurut (Suparmoko, 2002:19) penduduk usia kerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk yang belum bekerja tetapi siap untuk bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Angkatan kerja terdiri dari golongan bekerja, golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud bukan angkatan kerja merupakan mereka yang mengurus rumah tangga, masih sekolah, dan penerima pendapatan.

2.1.1.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Pengertian penyerapan tenaga kerja di dalam penelitian ini merupakan jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di semua sektor ekonomi, dalam perihal ini adalah Provinsi Jawa Barat. Penyerapan tenaga kerja adalah suatu jumlah

kuantitas tertentu dari tenaga kerja yang diperlukan oleh suatu sektor atau unit usaha tertentu. Dengan kata lain, penyerapan tenaga kerja dapat diartikan secara luas yaitu menyerap tenaga kerja dalam arti menghimpun orang ataupun tenaga kerja di dalam suatu lapangan usaha. Penyerapan tenaga kerja juga dapat diartikan secara luas yakni menyerap tenaga kerja dalam arti menghimpun orang atau tenaga kerja di suatu lapangan usaha. Apabila lapangan usaha yang tersedia tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam kondisi yang siap pakai, maka diperlukan peranan pemerintah untuk mengatasi masalah kualitas tenaga kerja yang berkemampuan dalam mengembangkan, memanfaatkan, dan menguasai IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), serta pelatihan keterampilan dan wawasan yang dapat mempermudah proses penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan (Mulyadi, dalam Alhiriani, 2013:9).

Untuk memperluas penyerapan tenaga kerja salah satu caranya adalah dengan terciptanya banyak lapangan pekerjaan baru. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap tenaga kerja di antaranya, yaitu:

1. Padat Karya (*Labor Intensive*)

Padat karya atau *labor intensive* yaitu kegiatan proses produksi yang relatif lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia dibandingkan tenaga mesin, tujuannya yakni untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga perusahaan yang menerapkan sistem ini dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

2. Padat Modal (*Capital Intensive*)

Padat modal atau *capital intensive* merupakan industri yang dibangun dengan modal yang besar dan didukung oleh teknologi tinggi, sehingga proses produksinya cenderung menekan pada penggunaan mesin-mesin canggih dibandingkan dengan tenaga manusia. Banyak perusahaan lebih memilih teknologi padat modal ini dikarenakan tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk tenaga kerja.

2.1.1.3 Teori-Teori Ketenagakerjaan

Menurut (Mulyadi, 2018:70-71) ada dua teori penting yang perlu dikemukakan dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan, di antaranya yaitu:

1. Teori Lewis (1959)

Lewis mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberi andil terhadap pertumbuhan *output* dan penyediaan pekerja di sektor lainnya. Ada dua struktur di dalam perekonomian negara berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan sektor terbelakang. Menurut Lewis sektor subsisten terbelakang tidak hanya terdiri dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pengecer koran.

Sektor subsisten terbelakang mempunyai kelebihan penawaran pekerja dengan tingkat upah relatif murah daripada sektor kapasitas modern. Lebih murah biaya upah pekerja asal pedesaan akan dapat menjadi pendorong bagi pengusaha di perkotaan untuk memanfaatkan pekerja tersebut dalam pengembangan industri modern perkotaan. Selama berlangsungnya proses

industrialisasi, kelebihan penawaran pekerja di sektor subsisten terbelakang akan diserap.

Bersamaan dengan terserapnya kelebihan pekerja di sektor industri modern, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Selanjutnya peningkatan upah ini akan mengurangi/perbedaan/ketimpangan tingkat pendapatan antar perkotaan dan pedesaan. Dengan demikian menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa perpindahan pekerja dari sektor subsisten ke kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi “terlalu banyak”.

2. Teori Fei-Ranis (1961)

Teori ini berkaitan dengan negara berkembang yang mempunyai ciri-ciri seperti kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi. Menurut Fei-Ranis ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh, di antaranya yaitu:

- a. Tahap dimana para pengangguran semu (yang tidak menambah *output* pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama.
- b. Tahap dimana pekerja pertanian menambah *output* tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan pula ke sektor industri.

- c. Tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan *output* lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dalam hal ini kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industri yang meningkat terus-menerus sejalan dengan penambahan *output* dan perluasan usahanya.

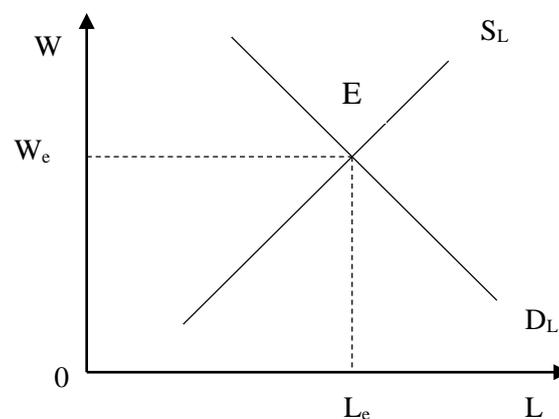
2.1.1.4 Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat upah dapat menyebabkan semakin kecil permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja.

Penawaran tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan mempengaruhi tingkat upah terutama untuk jenis jabatan yang sifatnya khusus. Akibatnya kenaikan dari upah akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang ditawarkan (Sumarsono, 2003:107).

Permintaan dan penawaran tenaga kerja sangat erat kaitannya dalam menentukan upah di suatu perusahaan (Sadono, 2003:369). Dalam suatu pekerjaan terdapat penawaran tenaga kerja yang besar tetapi tidak banyak permintaan, maka upah untuk mencapai tingkat yang tinggi sangat rendah. Sebaliknya jika dalam suatu pekerjaan yang terdapat penawaran tenaga kerja terbatas akan membuat permintaannya menjadi sangat besar, maka upah cenderung mencapai tingkat

tinggi. Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan yang ada di masyarakat dan dipengaruhi oleh faktor penyediaan dan permintaan tersebut. Besar penyediaan dan permintaan terhadap tenaga kerja dipengaruhi dengan tingkat upah. Jika tingkat upah turun, maka jumlah penawaran tenaga kerja akan meningkat. Tetapi jika tingkat upah meningkat, maka jumlah permintaan tenaga kerja menjadi menurun (Simanjuntak, 2001).



Gambar 2. 1 Kurva Keseimbangan Tenaga Kerja

Sumber: (Mankiw, 2012:379). Pengantar Ekonomi Mikro.

Keterangan:

S_L : penawaran tenaga kerja (*supply labor*)

D_L : permintaan tenaga kerja (*demand labor*)

W : upah

L : jumlah tenaga kerja

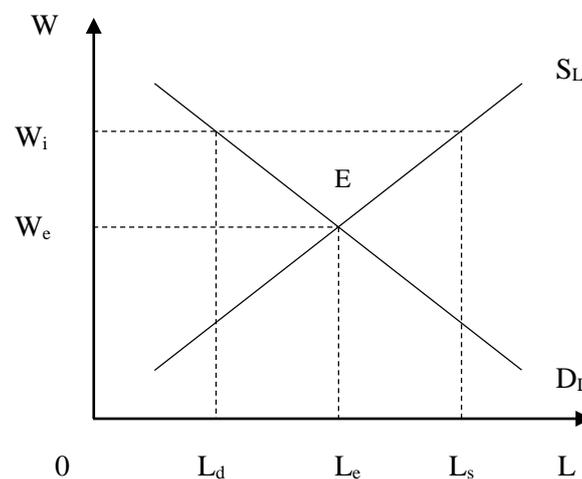
W_e : upah keseimbangan

L_e : jumlah tenaga kerja keseimbangan

E : keseimbangan permintaan dan penawaran

Kurva keseimbangan tenaga kerja pada gambar 2.1 menunjukkan pasar tenaga kerja sama dengan pasar lainnya dimana tunduk pada kekuatan permintaan

dan penawaran. Para pekerja yang menentukan penawaran tenaga kerja, dan sebaliknya perusahaan yang menentukan jumlah permintaannya. Jika pemerintah tidak ikut campur tangan, maka upah biasanya akan menyesuaikan hingga terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja (Mankiw, 2004:379). Penyediaan atau penawaran tenaga kerja akan bertambah apabila tingkat upah meningkat, sebaliknya permintaan terhadap tenaga kerja akan berkurang apabila tingkat upah meningkat.



Gambar 2. 2 Kurva Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Sumber: (Chusna, 2013:16). Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, dan Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011.

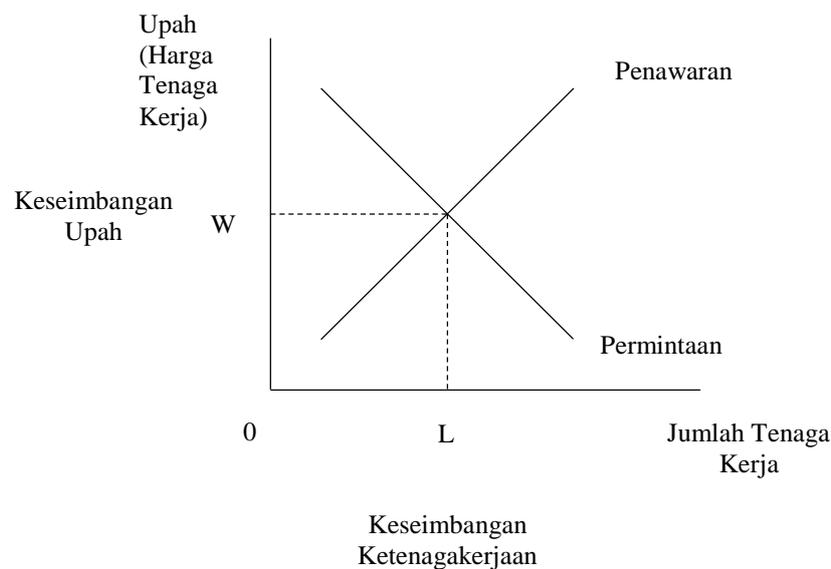
Dengan asumsi bahwa semua pihak mempunyai informasi yang lengkap mengenai pasar tenaga kerja, maka teori Neo-Klasik beranggapan bahwa jumlah penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan. Keadaan pada saat penawaran tenaga kerja selalu sama dengan permintaan dinamakan titik ekuilibrium (titik E). Dalam hal penawaran dan permintaan, tidak terjadi pengangguran (Chusna, 2013:16).

Kenyataan titik ekuilibrium itu tidak pernah tercapai karena informasi tidak pernah sempurna dan hambatan-hambatan institusional selalu ada. Upah yang

berlaku (W) pada umumnya lebih besar daripada upah equilibrium (W_e). Pada tingkat upah W_i , jumlah penawaran tenaga kerja adalah L_s sedangkan permintaan hanya sebesar L_d . Selisih antara L_s dan L_d merupakan jumlah pengangguran (Chusna, 2013:16-17).

2.1.1.5 Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja

Dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, upah ditentukan dengan dua fakta, yaitu upah menyesuaikan keseimbangan penawaran dan permintaan tenaga kerja dan upah setara dengan nilai penawaran dan permintaan tenaga kerja.



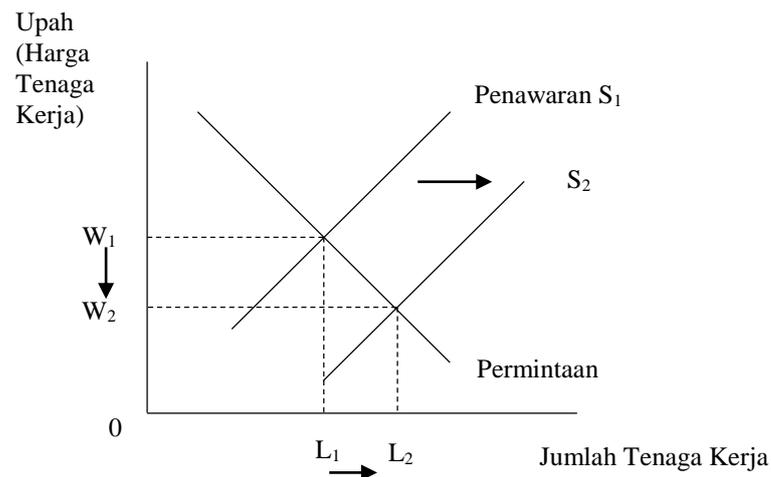
Gambar 2. 3 Kurva Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja

Sumber: (Mankiw, 2014:380). Pengantar Ekonomi Makro.

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja dalam keadaan seimbang. Keadaan upah dan jumlah tenaga kerja telah menyesuaikan dengan permintaan dan penawaran. Ketika pasar berada di titik keseimbangan, maka setiap perusahaan akan membeli tenaga kerja sebanyak mungkin selama masih memberi keuntungan pada keseimbangan upah. Setiap perusahaan mengikuti aturan untuk memaksimalkan laba, dengan mempekerjakan pekerja sampai nilai produk marjinal

tenaga kerja sama dengan upah. Oleh karena itu, nilai upah harus seimbang dengan nilai marginal produk tenaga kerja saat perusahaan menyeimbangkan penawaran dan permintaan (Mankiw, 2014:379-380).

1. Pergeseran dalam Penawaran Tenaga Kerja



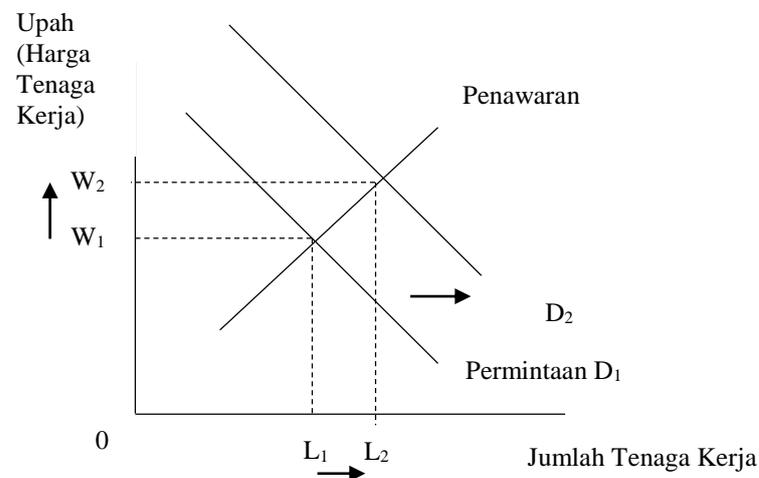
Gambar 2. 4 Kurva Pergeseran Penawaran Tenaga Kerja

Sumber: (Mankiw, 2014:381). Pengantar Ekonomi Makro.

Gambar 2.4 menunjukkan penawaran tenaga kerja meningkat dan bergeser ke arah kanan dari S₁ ke S₂ pada tingkat upah W₁, jumlah penawaran tenaga kerja telah melampaui dari jumlah permintaan. Kelebihan jumlah tenaga kerja membuat upah pekerja menurun. Menurunnya upah W₁ ke W₂ membuat perusahaan memperoleh keuntungan untuk menyewa pekerja lebih banyak sehingga tenaga kerja meningkat dari L₁ ke L₂.

Pada saat jumlah pekerja yang telah disewa meningkat, maka produk marginal pekerja akan turun. Dalam keseimbangan yang baru, baik upah ataupun nilai produk marginal tenaga kerja lebih rendah dari sebelum gelombang pekerja baru datang (Mankiw, 2014:380-381).

2. Pergeseran dalam Permintaan Tenaga Kerja



Gambar 2.5 Kurva Pergeseran Permintaan Tenaga Kerja

Sumber: (Mankiw, 2014:382). Pengantar Ekonomi Makro.

Pada gambar 2.5 permintaan tenaga kerja naik dari D_1 ke D_2 , keseimbangan upah dari W_1 ke W_2 , dan keseimbangan ketenagakerjaan naik dari L_1 ke L_2 . Perubahan dalam upah menunjukkan perubahan dalam nilai produk marginal tenaga kerja dengan harga produk perusahaan yang tinggi, produk tambahan dari pekerja ekstra lebih bernilai (Mankiw, 2014:381).

2.1.1.6 Elastisitas Permintaan Tenaga Kerja

Elastisitas permintaan tenaga kerja merupakan kepekaan terhadap permintaan tenaga kerja karena adanya perubahan variabel independen yang mempengaruhi tenaga kerja. Tingkat kepekaan dalam permintaan tenaga kerja bisa dilihat berdasarkan pada angka elastisitasnya. Bila angka elastisitas permintaan tenaga kerja tinggi, maka tingkat kepekaannya juga akan tinggi (Feriyanto, 2014).

Simanjuntak (2001:91-92) mengemukakan bahwa elastisitas permintaan akan tenaga kerja didefinisikan sebagai persentase perubahan permintaan akan

tenaga kerja sehubungan dengan perubahan satu persen pada tingkat upah. Secara umum dituliskan dalam persamaan:

$$e = \frac{\Delta N/N}{\Delta W/w}$$

Dimana:

e = Elastisitas permintaan akan tenaga kerja

ΔN = Perubahan jumlah pekerja yang terjadi

N = Jumlah yang bekerja mula-mula

ΔW = Besarnya perubahan tingkat upah

W = Tingkat upah yang sedang berlaku.

Persamaan di atas dapat ditulis dalam bentuk:

$$e = \frac{\Delta N}{\Delta W} \cdot \frac{W}{N}$$

atau dalam bentuk diferensial:

$$e = \frac{\partial N}{\partial W} \cdot \frac{W}{N}$$

Bila tingkat upah naik, jumlah orang yang dipekerjakan menurun, dan sebaliknya. Jadi, $\frac{\Delta N}{\Delta W}$ dalam persamaan di atas dan $\frac{\partial N}{\partial W}$ adalah negatif. Oleh sebab itu elastisitas permintaan akan tenaga kerja juga negatif. Besar kecilnya elastisitas permintaan tergantung dari empat faktor, yaitu:

1. Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain, misalnya modal.
2. Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan.
3. Proporsi biaya tenaga kerja terhadap seluruh biaya produksi.
4. Elastisitas persediaan dari faktor produksi pelengkap lainnya.

2.1.2 Upah

2.1.2.1 Pengertian Upah

Teori Neo-Klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marjinal dari faktor produksi tersebut. Ini berarti bahwa pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marjinal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut (Simanjuntak, 2001:127-128). Dengan kata lain tingkat upah yang dibayarkan oleh pengusaha adalah:

$$W = VMPP_L = MPP_L \times P$$

W : tingkat upah (dalam arti *labor cost*) yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja.

P : harga jual barang (hasil produksi) dalam rupiah per unit barang.

MPP_L : *marginal physical product of labor* atau pertambahan hasil marjinal pekerja, diukur dalam unit barang per unit.

VMPP_L: *value of marginal physical product of labor* atau dinilai pertambahan hasil marjinal pekerja atau karyawan.

Nilai pertambahan nilai marjinal karyawan VMPP_L, merupakan nilai jasa yang diberikan oleh karyawan kepada pengusaha. Sebaliknya upah, W, dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan sebagai imbalan terhadap jasa karyawan yang diberikan kepada pengusaha.

Jadi selama nilai pertambahan hasil marjinal karyawan lebih besar dari upah yang dibayarkan pengusaha ($VMPP_L > W$), pengusaha dapat menambah keuntungan dengan menambah pekerja, namun pengusaha tentu tidak bersedia membayar upah yang lebih besar dari nilai usaha kerja yang diberikan karyawan kepada pengusaha. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut teori Neo-Klasik, karyawan memperoleh upah senilai dengan pertambahan hasil marjinalnya. Dengan kata lain, upah dalam hal ini berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut kepada pengusaha (Simanjuntak, 2001:127-128).

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Pasal (1) Huruf (a) tentang perlindungan upah berbunyi, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang, yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan per undang-undangan dan dibayar atas suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya (Trimaya, 2014:14). (Sukirno, 2005:351) menjelaskan bahwa upah mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Upah Uang

Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi.

2. Upah Riil

Upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jarring pengaman. Sementara itu, (Sumarno, 2003:141) menjelaskan upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektor regional maupun sub sektoral. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan terendah yang ditetapkan dan diatur secara minimal baik regional, sektoral, maupun sub sektoral.

Tujuan ditetapkan upah minimum oleh pemerintah adalah untuk memenuhi standar hidup minimum, sehingga dapat meningkatkan derajat penduduk berpendapatan rendah tanpa mengurangi produktifitas perusahaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013 pasal 3 tentang Dasar dan Wewenang Penetapan Upah Minimum yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL), produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

2.1.2.2 Fungsi Upah

Upah merupakan faktor utama bagi tenaga kerja, karena digunakan untuk membiayai kehidupan tenaga kerja beserta keluarganya. (Soepomo dalam Halim 2001:178), mengatakan bahwa pada hakikatnya fungsi dari upah, yaitu:

1. Perwujudan keadilan sosial dalam rangka memanusiakan manusia.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar yang minimal bagi tenaga kerja pada tingkat dimana hidup layak dari hasil pekerjaan yang dilakukan.
3. Pendorong peningkatan disiplin dan produktivitas kerja.

Selain itu, menurut (Mochtar Halim, 2000:24), fungsi upah itu berbeda-beda, tergantung dari sudut mana upah itu dilihat, sebagaimana berikut ini:

1. Dari sudut pandang tenaga kerja, upah berfungsi sebagai kebutuhan hidup yang layak bersama keluarganya.
2. Dari sudut pandang pemberi kerja, upah berfungsi sebagai unsur penggerak dalam proses produksi dan merupakan biaya produksi dari perusahaan.
3. Dari sudut pandang pemerintah, upah merupakan tolak ukur hidup masyarakat. Oleh karena itu, perumusan upah harus dapat menciptakan iklim usaha yang harmonis, serasi, mentap, tenteram, dan dinamis.

2.1.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah

Menurut (Sukirno, 2005:364-365) tingkat upah dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu:

1. Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis penawaran pekerjaan dan tenaga kerja.
2. Perbedaan corak pekerjaan, seperti ringan dan mudah dikerjakan tingkat upah akan cenderung lebih rendah dari pekerjaan yang berat dan sulit dikerjakan.
3. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan.

4. Pertimbangan bukan keuangan, seperti fasilitas perumahan tersedia, jauh-dekatnya dari rumah pekerja, lokasi pekerjaan ada di kota atau di daerah terpencil dan lain sebagainya.
5. Ketidaksempurnaan mobilitas pekerja.

Selain itu, (T. Gilarso, 2003:215-216) berpendapat bahwa setidaknya ada beberapa hal yang mempengaruhi penentuan tingkat upah yang berlaku dalam masyarakat, yaitu:

1. Produktivitas kerja.
2. Tingkat harga.
3. Struktur ekonomi nasional.
4. Peraturan pemerintah.
5. Keadilan dan perikemanusiaan.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.1.3.1 Pengertian PDRB

PDRB menurut BPS, PDRB diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu wilayah selama satu periode tertentu, atau PDRB merupakan jumlah seluruh nilai barang maupun jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di wilayah dalam satu periode tertentu. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karenanya, besarnya PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di wilayah tersebut.

2.1.3.2 Cara Perhitungan dan Penyajian PDRB

Berdasarkan BPS, cara perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

Berdasarkan pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya di antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor ataupun sektor dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan adalah suatu pendekatan dimana pendapatan nasional diperoleh melalui penjumlahan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap produksi. Jadi, pendapatan nasional yang dimaksud disini diperoleh melalui penjumlahan dari berbagai unsur dan jenis pendapatan, di antaranya:

- a. Kompensasi bagi pekerja terdiri dari upah (*wages*) dan gaji (*salaries*) ditambah faktor lainnya terhadap upah dan gaji (contohnya, rencana dari pengusaha dalam perihal pensiun dan dana jaminan sosial).
- b. Keuntungan perusahaan adalah kompensasi kepada pemilik perusahaan yang dimana digunakan untuk membayar pajak keuntungan perusahaan, juga dibagikan kepada para pemilik saham sebagai deviden dan ditabung perusahaan selaku laba perusahaan yang tidak dibagikan.

- c. Pendapatan usaha perorangan adalah kompensasi atas penggunaan tenaga kerja dan sumber-sumber dari *self employed person* (orang yang bekerja sendiri), *self employed professional* (pekerja mandiri professional) dan lain-lain.
- d. Pendapatan sewa adalah kompensasi untuk pemilik tanah, *rental business* (bisnis persewaan) dan *residential properties* (properti tempat tinggal).
- e. Bunga netto atau *net interest* terdiri atas bunga yang dibayarkan perusahaan dikurangi dengan bunga yang diterima oleh perusahaan ditambah dengan bunga netto yang diterima dari luar negeri, bunga yang dibayar pemerintah dengan konsumen tidak termasuk di dalamnya.

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta di dalam proses produksi dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud ialah sewa rumah, upah dan gaji, bunga modal dan keuntungan. Semua perhitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah pendapatan nasional yang didapat dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir atas output yang dihasilkan perekonomian dan diukur pada harga pasar yang berlaku. Bisa dikatakan bahwa PDRB merupakan penjumlahan semua komponen permintaan akhir. Komponen-komponen tersebut sebagai berikut:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta tidak mencari untung,
- b. Konsumsi pemerintah,

- c. Pembentukan modal tetap domestik bruto,
- d. Perubahan stok,
- e. Ekspor netto.

Cara penyajian PDRB disusun dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

- 1) PDRB atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitungnya menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan guna melihat pergeseran dan struktur ekonomi.
- 2) PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitungnya menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan digunakan guna mengetahui laju pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, yang dimana faktor perubahan harga telah dikeluarkan.

Pada tahun 2010, BPS mengubah harga tahun dasar, yang tadinya tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010. Tahun 2010 terpilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun 2000 karena beberapa alasan berikut:

- 1) Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama di bidang informasi dan juga teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru.
- 2) Teridentifikasinya pembaharuan konsep, klasifikasi, definisi, cakupan dan metodologi sesuai dengan rekomendasi dalam *System of National Account* (SNA) 2008.
- 3) Perekonomian Indonesia relatif stabil.

2.1.4 Investasi

2.1.4.1 Pengertian Investasi

Investasi mempunyai beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Teori ekonomi mengartikan investasi sebagai pengeluaran guna pembelian modal atau barang-barang yang tidak dikonsumsi saat ini, namun digunakan untuk kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa di masa yang akan datang. Investasi dapat disebut juga sebagai penanaman modal. Berikut beberapa pengertian investasi menurut para ahli:

Menurut (Jogiyanto, 2010) pengertian investasi merupakan penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan didalam produksi yang efisien selama kurun waktu tertentu.

Menurut (Tandelilin, 2010) investasi merupakan:

"Komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Para investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut"

Menurut (Martalena dan Malinda, 2011) investasi adalah bentuk penundaan konsumsi saat ini untuk memperoleh konsumsi di masa mendatang, dimana di dalamnya terkandung unsur risiko ketidakpastian, maka dari itu dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi merupakan kegiatan yang mengorbankan sumber-sumber daya

yang terkait di masa sekarang untuk mendapat keuntungan atau laba di masa mendatang. Tidak hanya berharap laba yang besar, tetapi investor harus memperhatikan juga risiko-risiko yang menyertai kegiatan investasi.

Pihak-pihak yang melaksanakan investasi disebut investor. Investor pada umumnya digolongkan menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

- 1) Investor individual, yang termasuk investor individual yaitu individu-individu yang melaksanakan aktivitas investasi.
- 2) Investor institusional, yang termasuk investor institusional yaitu perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpan dana (bank dan lembaga simpan pinjam), perusahaan investasi, maupun lembaga dana pensiun.

Investasi pula mempelajari bagaimana mengelola kesejahteraan investor (*investors wealth*). Kesejahteraan di dalam konteks investasi berarti kesejahteraan yang sifatnya moneter bukan kesejahteraan rohaniyah. Kesejahteraan moneter dapat ditunjukkan oleh penjumlahan pendapatan yang dimiliki pada saat ini dan nilai pada saat ini (*present value*) pendapatan di masa mendatang.

Maka dari itu dalam pengertian yang lebih luas, kapan saja seseorang memutuskan buat tidak menghabiskan seluruh pendapatannya saat ini, maka dia dihadapkan pada keputusan investasi. Investasi ini digunakan guna memperbesar uangnya untuk mengkonsumsi di masa yang akan datang. Maka, hal ini bisa diartikan sebagai konsumsi yang ditunda.

Di dalam investasi ini, investor tidak dapat meyakinkan hasil yang akurat atas kegiatan yang dilakukannya ataupun dengan kata lain investor menghadapi risiko di dalam investasi tersebut. Tetapi investor dapat memperkirakan

keuntungan/laba yang akan didapatkan atas investasinya juga seberapa besar penyimpangan yang terjadi dibandingkan dengan laba yang diharapkan.

2.1.4.2 Tujuan Investasi

Tujuan investasi pada umumnya untuk menghasilkan sejumlah uang dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan investor, kesejahteraan di dalam hal ini ialah kesejahteraan moneter, yang dapat diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan masa mendatang.

Menurut (Tandelilin, 2010) ada beberapa alasan seseorang melakukan investasi, di antaranya adalah:

- 1) Agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik/layak di masa mendatang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana untuk meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu ataupun setidaknya berusaha mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada di masa sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.
- 2) Mengurangi tekanan inflasi. Dengan seseorang melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan ataupun objek lain, maka seseorang dapat menghindari dirinya dari risiko penurunan nilai kekayaan ataupun hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.
- 3) Dorongan guna menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi masyarakat dengan pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi di bidang-bidang usaha tertentu.

Sumber dana investasi bisa berasal dari aset-aset yang dimiliki masa sekarang, pinjaman dari pihak lain, atau dari tabungan. Investor yang mengurangi konsumsinya dimasa sekarang dapat mempunyai kemungkinan kelebihan dana untuk ditabung. Dana yang berasal dari tabungan tersebut jika diinvestasikan oleh investor, maka memberikan harapan peningkatan kemampuan konsumsi investor di masa mendatang, yang didapat dari peningkatan kesejahteraan investor.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Investasi

Investasi dibagi menjadi dua yaitu: (1) investasi di dalam bentuk aktiva riil (*real asset*), artinya aktiva yang berwujud seperti emas, intan, perak, dan lain-lain; (2) investasi di dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas (*marketable securities/financial asset*) artinya surat-surat berharga pada dasarnya ialah klaim atas aktiva riil yang dikuasai oleh organisasi atau entitas. Dalam investasi pada sebuah perusahaan atau institusi, pemikiran aktiva finansial dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

1) Investasi langsung (*direct investing*)

Investasi langsung merupakan suatu kepemilikan surat berharga secara langsung dalam perusahaan atau institusi yang secara resmi telah *go public*, dengan harapan akan mendapatkan keuntungan/laba berupa penghasilan dividen atau *capital gain*.

2) Investasi tidak langsung (*indirect investing*)

Investasi tidak langsung ini terjadi ketika surat-surat berharga yang dimiliki diperjual belikan kembali oleh perusahaan investasi (*investment company*) yang berfungsi sebagai perantara.

2.1.5 Rata-Rata Lama Sekolah

Menurut (Todaro, 2000) menjelaskan bahwa pendidikan adalah tujuan pembangunan yang mendasar dimana pembelajaran memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan di sebuah negara dalam menyerap teknologi modern serta untuk meningkatkan kapasitas supaya tercipta pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan semakin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh penduduk suatu wilayah. Jadi dengan semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah ialah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk umur 25 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang diikutinya. Rata-rata lama sekolah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

Dimana:

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

x_i = Lama sekolah penduduk ke- i yang berusia 25 tahun

n = jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Menurut (Todaro, 2000) tingkat penghasilan sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan. Rata-rata lama sekolah adalah indikator tingkat pendidikan di suatu wilayah. Pendidikan adalah salah satu bentuk modal manusia (*human capital*) yang dapat menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk bisa memaksimalkan selisih antara keuntungan yang diharapkan dengan biaya-biaya yang diperkirakan, maka strategi maksimal bagi

seseorang ialah berusaha menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya. Investasi dalam modal manusia akan tampak lebih tinggi manfaatnya apabila kita bandingkan antara total biaya pendidikan yang dikeluarkan sepanjang menempuh pendidikan terhadap pendapatan yang nantinya akan diperoleh pada saat mereka sudah siap bekerja. Orang-orang yang berpendidikan tinggi akan memulai kerja penuh waktunya pada umur yang lebih tua, tetapi pendapatan mereka akan cepat naik dari pada orang yang bekerja lebih awal (Todaro, 2000).

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah ada sebelumnya dan sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Variabel	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kontribusi Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Medan Tahun 2012-2015 (Fransisca Natalia Sihombing, 2017)	- Tingkat Pendidikan (X1) - Upah Minimum (X2) - Tenaga Kerja (Y)	Dependen - Tenaga Kerja Independen - Upah Minimum - Tingkat Pendidikan	Penulis: Independen - PDRB - Investasi	Menunjukkan bahwa semakin bertambah 1% tingkat pendidikan maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja sebesar 0,342 % dan apabila upah minimum bertambah 1% maka dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja sebesar 0,015 %, serta kontribusi tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap penyerapan	Jurnal Pembang unan Perkotaan Volume 5 Nomor 1 p-ISSN: 2338-6754

No	Judul dan Penulis	Variabel	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					tenaga kerja sebesar 70,10% (tinggi).	
2	Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia (Rini Sulistiawati, 2012)	Upah Minimum (X) - Penyerapan Tenaga Kerja (Y1) - Kesejahteraan masyarakat (Y2)	Dependen - Penyerapan Tenaga Kerja Independen - Upah Minimum	Rini: Dependen - Kesejahteraan masyarakat Penulis: Independen - PDRB - Investasi - Tingkat Pendidikan	Pertama, upah minimum negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kedua, penyerapan tenaga kerja memiliki positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial.	ISSN 1693 – 9093 Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 hal 195 - 211
3	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Tanah Laut (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut) (Muhammad Shapiq Gautama, Anisa Nurhabibah Pyadini, dan Dina Ulya, 2021)	- Kesempatan Kerja (X1) - Tingkat Pendidikan (X2) - Jenis Kelamin (X3) - Risiko Pekerjaan (X4) - Usia Tenaga Kerja (X5) - Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	Dependen - Penyerapan Tenaga Kerja Independen - Tingkat Pendidikan	Muhammad, dkk: Independen - Kesempatan Kerja - Jenis Kelamin - Risiko Pekerjaan - Usia Tenaga Kerja Penulis: - Upah Minimum - PDRB - Investasi	Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tanah Laut adalah kualitas sumber daya manusia itu sendiri di antaranya tingkat pendidikan, usia tenaga kerja, tingkat risiko pekerjaan, tingkat kemauan tenaga kerja dalam mencari kesempatan kerja, jenis kelamin, dan tingkat upah.	Jurnal Riset Akuntansi Politala e-ISSN: 2656-7652 Vol. 4 No.1, Juni 2021, pp.15-21 p-ISSN: 2715-4610 http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index
4	Faktor-Faktor yang	- Produk Domestik	Dependen	Andi, dkk: Independen	Menunjukkan Produk	Jurnal Ekonomi,

No	Judul dan Penulis	Variabel	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah 2014-2019 (Andi Nurahman Ramdani, Supadi, dan Nunik Kadarwati, 2021)	Regional Bruto (X1) - Upah Minimum Kabupaten/Kota (X2) - Inflasi (X3) - Indeks Pembangunan Manusia (X4) - Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	- Penyerapan Tenaga Kerja Independen - UMK - PDRB	- Inflasi - IPM Penulis: Independen - Tingkat Pendidikan - Investasi	Domestik Regional Bruto dan inflasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.	Bisnis dan Akuntansi (JEBA) Volume 23 No 2 Tahun 2021 E-ISSN: 2715-6044 P-ISSN: 2715-6052
5	Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Lombok Barat (Lalu Mimbar dan Muhammad Yusuf, 2016)	- Laju pertumbuhan sektor industry (X1) - Investasi (X2) - Upah (X3) - Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	Dependen - Penyerapan Tenaga Kerja Independen - Investasi - Upah	Lalu dan Muhammad: Independen - Laju pertumbuhan sektor industry Penulis Independen - PDRB - Tingkat Pendidikan	Menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan sektor industri selama tahun pengamatan menunjukkan kecenderungan menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,42%, merupakan laju pertumbuhan industri variabel sektor berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri. Investasi variabel dan	Jurnal Valid Vol. 13 No. 3, Juli 2016 : 333 – 343 ISSN 1829-5037 (Print) ISSN 2621-4954 (Online)

No	Judul dan Penulis	Variabel	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Variabel gaji berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Berdasarkan uji bersama menunjukkan bahwa variabel independen tingkat pertumbuhan sektor industri, investasi dan upah secara simultan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri di Lombok Barat.	
6	Analisis Pengaruh Upah, Tingkat pendidikan, Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Berau Kalimantan Timur (Djupiansyah Ganie, 2017)	- Upah (X1) - Tingkat Pendidikan (X2) - Jumlah Penduduk (X3) - PDRB (X4) - Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	Dependen - Penyerapan Tenaga Kerja Independen - Upah - Tingkat Pendidikan - PDRB	Djupiansyah: Independen - Jumlah Penduduk Penulis: - Investasi	Upah, tingkat pendidikan, jumlah penduduk dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Berau. Sedangkan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap	Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume1 4, Nomor 2, Desember 2017 p-ISSN : 1829-7501 e-ISSN : 2579-5856

No	Judul dan Penulis	Variabel	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Berau adalah faktor jumlah penduduk dimana faktor tersebut memiliki nilai koefisien regresi yang paling besar di antara faktor lainnya.	
7	Pengaruh PDRB, UMK, IPM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Jawa Barat 2010-2020 (Emil Abdhal Hafiz dan Ria Haryatiningsih, 2021)	- Produk Domestik Regional Bruto (X1) - Upah Minimum Kabupaten/Kota (X2) - Indeks Pembangunan Manusia (X3) - Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	Dependen - Penyerapan Tenaga Kerja Independen - PDRB - UMK	Emil dan Ria: Independen - IPM Penulis: - Investasi - Tingkat Pendidikan	Secara parsial bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, UMK berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan IPM berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, secara simultan seluruh variabel independen memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Jawa Barat.	Journal Riset Ilmu Ekonomi https://doi.org/10.29313/jrie.v1i1.174 Volume 1, No. 1, Tahun 2021, Hal: 55-65 ISSN: 2798-639X p-ISSN: 2806-3024
8	Pengaruh Tingkat Pendidikan dan UMK Terhadap penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Mojokerto	- Tingkat Pendidikan (X1) - UMK (X2) - Tenaga Kerja (Y)	Dependen - Tenaga Kerja Independen - UMK - Tingkat Pendidikan	Penulis: - PDRB - Investasi	Jika terjadi kenaikan 1% pada variabel pendidikan, maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja sebesar	Jurnal Inovasi Penelitian Vol.1 No.7 Desember 2020 1341 ISSN

No	Judul dan Penulis	Variabel	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tahun 2014-2018 (Eva Agustin, 2020)				0.081776%. Sedangkan untuk nilai variabel UMK (X2) diperoleh bahwa jika terjadi kenaikan 1% variabel UMK maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja sebesar 0.074995%. Sementara jika dilihat pada tabel R-square atau koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R-square sebesar 0,978793 atau mendekati satu. Artinya pengaruh tingkat pendidikan dan UMK yaitu sebesar 97,87% (Tinggi) melalui hubungan linier sementara sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.	2722-9475 (Cetak) ISSN 2722-9467 (Online)
9	Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta (Dimas dan Nenek Woyanti, 2009)	- PDRB (X1) - Upah riil (X2) - Investasi (X3) - Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	Dependen - Penye- rapan Tenaga Kerja	Dimas dan Nenek: Independen - Upah Riil Penulis: - Upah Minimum	Ada 3 hasil penelitian. Pertama, PDB memiliki signifikansi positif mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.	Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2009, Hal. 32 - 41 Vol.

No	Judul dan Penulis	Variabel	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				- Tingkat Pendidikan	Kedua, faktor upah berpengaruh negatif signifikan pada. Dan ketiga, investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap. Yang terakhir hasilnya tidak sesuai dengan teori, karena sebagian besar investor di Jakarta lebih banyak menggunakan padat modal daripada padat karya.	16, No.1 Maret 2009 ISSN: 1412- 3126
10	Analisis Tentang Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi di Pulau Sumatera, Indonesia (Bonaraja Purba, 2020)	- Investasi PMDN (X1) - Investasi PMA (X2) - Pertumbuhan Ekonomi (PE) (Y1) - Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) (Y2)	Dependen - Penyerapan Tenaga Kerja	Bonaraja: Dependen - Pertumbuhan Ekonomi Independen - Investasi PMDN - Investasi PMA Penulis: Independen - Upah Minimum - PDRB - Investasi - Tingkat Pendidikan	Menunjukkan bahwa di provinsi Sumatera: (a) Investasi PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (b) Investasi PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (c) Investasi PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap	Jurnal Humaniora, Vol. 4, No.1, April 2020: 196-204 Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora ISSN 2548-9585 (Online)

No	Judul dan Penulis	Variabel	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					penyerapan tenaga kerja, (d) Investasi PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.	
11	Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan (Dirta Pratama Atiyatna, Nurlina T. Muhyiddin, dan Bambang Bemby Soebyakto, 2016)	- Upah Minimum Provinsi (X1) - Pertumbuhan Ekonomi (X2) - Pendidikan (X3) - Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	Dependen Penyerapan Tenaga Kerja	Dirta, dkk: Independen - Upah Minimum Provinsi - Pertumbuhan Ekonomi - Pendidikan Penulis: Independen - Tingkat Upah - PDRB - Investasi - Tingkat Pendidikan	Boneka yang digunakan adalah pendidikan di bawah SMA dan di atas SMA sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum dan variabel dummy (1) berpengaruh signifikan terhadap tenaga kerja penyerapan selama periode pengamatan. Terdapat hubungan positif kedua variabel tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja di mana penyerapan tenaga kerja meningkat seiring dengan peningkatan upah minimum dan dummy variabel (1). Sementara itu, multikolineari-	Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 14 (1): 8-21, Juni 2016 Diterima: 2016-02-17; Disetujui: 2016-05-12 p-ISSN: 1829-5843

No	Judul dan Penulis	Variabel	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					tas terjadi ketika pertumbuhan ekonomi ditambahkan, sehingga dihilangkan dari model. Variasi dummy (1) secara signifikan lebih berpengaruh dibandingkan variabel dummy (2) yang menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi pada pendidikan dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).	
12	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Jambi (Nurvita Sari, Yulmardi, dan Adi Bhakti, 2016)	- Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (X1) - Pertumbuhan Penduduk (X2) - Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (X3) - Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	Dependen -Penyerapan Tenaga Kerja Independen - PDRB	Nurvita, dkk: Independen - Pertumbuhan Penduduk - Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Penulis: Independen - Tingkat upah - Investasi -Rata-rata Lama Sekolah	Menunjukkan bahwa ketiga variabel pertumbuhan ekonomi, penduduk, dan produktivitas tenaga kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan	e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 5. No.1, Januari – April 2016 ISSN: 2303-1220

No	Judul dan Penulis	Variabel	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.	
13	Pengaruh Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh (Chahayu Astina, Abubakar Hamzah, dan Muhammad Nasir)	- Jumlah industri pariwisata (X1) - Jumlah wisatawan manca-negara (X2) - Jumlah objek wisata (X3) - Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	Dependen Penyerapan Tenaga Kerja	Chahayu, dkk: Independen - Jumlah industri pariwisata - Jumlah wisatawan manca-negara - Jumlah objek wisata Penulis: Independen - Tingkat Upah - PDRB - Investasi - Tingkat Pendidikan	Uji statistik t ratio adalah t-hitung > t-tabel ada di semua variabel bebas yaitu industri pariwisata, wisatawan mancanegara dan objek wisata masing-masing sebesar 2,135, 2,375 dan 4,222 dengan ttabel sebesar 2,1098 sehingga berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja. Uji F diperoleh F hitung > F tabel, artinya ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh	Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 2302-0172 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 11 Pages pp. 14- 24

No	Judul dan Penulis	Variabel	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					secara signifikan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja dengan diperoleh F hitung sebesar 27,1098 dengan F tabel sebesar 3,1504.	
14	Pengaruh Investasi dan Ekspor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Ni Made Sintya Dewi dan I Ketut Sutrisna)	- Investasi (X1) - Ekspor (X2) - Pertumbuhan Ekonomi (Y1) - Penyerapan Tenaga Kerja (Y2)	Dependen - Penyerapan Tenaga Kerja Independen - Investasi	Ni dan I Ketut: Dependen - Pertumbuhan Ekonomi Independen - Ekspor Penulis: -Tingkat Upah - Tingkat Pendidikan -PDRB	Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi dan ekspor berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi. Peningkatkan penyerapan tenaga kerja dilakukan dengan meningkatkan investasi pada industri padat karya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan bahan baku ekspor yang berasal dari daerah sendiri.	E- Jurnal EP Unud, 4 [6] : 621-636 ISSN 2303-0178
15	Analisis Investasi	- Suku Bunga (X1)	Dependen	Irma, dkk: Dependen	Menggunakan model	Jurnal Paradigm

No	Judul dan Penulis	Variabel	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sektor Industri Manufaktur, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia (Irma Mar'atus Sholihah, Syaparuddin, dan Nurhayani, 2017)	- Nilai Tukar Rupiah (X2) - Konsumsi Rumah Tangga (X3) - Impor Bahan Baku Industri Manufaktur (X4) - Ekspor Hasil Industri Manufaktur (X5) - Investasi Sektor Industri Manufaktur (X6) - Pertumbuhan Ekonomi (Y1) - Penyerapan Tenaga Kerja (Y2)	Penyerapan Tenaga Kerja	- Pertumbuhan Ekonomi Independen - Suku Bunga - Nilai Tukar Rupiah - Konsumsi Rumah Tangga - Impor Bahan Baku Industri Manufaktur - Ekspor Hasil Industri Manufaktur - Investasi Sektor Industri Manufaktur Penulis: - Tingkat Upah - PDRB - Investasi Pendidikan	persamaan simultan dengan metode <i>two stage least square</i> (2SLS). Hasil penelitian menunjukkan investasi industri manufaktur secara simultan dipengaruhi oleh suku bunga (SB), nilai tukar (NT) dan penyerapan tenaga kerja industri manufaktur (PTK). Investasi tersebut digunakan sebagai salah satu komponen pembangunan perekonomian suatu wilayah karena melalui investasi, kapasitas produksi dapat ditingkatkan yang kemudian mampu meningkatkan output, yang akhirnya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Indonesia.	a Ekonomik a Vol. 12. No. 1, Januari—Juni 2017 ISSN: 2085-1960 (print)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Sumarso (2003: 105 dalam jurnal Investasi et al., 2012) menyatakan jika upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi yang bisa menyebabkan pengangguran maupun penambahan jumlah penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena upah dipandang sebagai beban (tanggung jawab) bagi perusahaan, karena upah adalah biaya yang harus dikeluarkan guna pembayaran tenaga kerja (input produksi).

Penelitian ini memiliki hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ganie, 2017) yang mengatakan bahwa nilai upah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Tingkat upah memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Apabila upah meningkat, maka akan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Karena naiknya tingkat upah akan menaikkan harga per unit barang yang diproduksi. Apabila banyak barang yang tidak terjual, maka produsen terpaksa mengurangi jumlah produksinya. Turunnya sasaran produksi, menyebabkan berkurangnya tenaga kerja yang diperlukan.

2.2.2 Hubungan PDRB dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Permintaan barang dan jasa di dalam suatu perekonomian dapat mempengaruhi tingkat output yang harus diproduksi, sehingga berdampak juga pada penggunaan inputnya (tenaga kerja). Karena sesuai dengan teori produksi yang mengatakan input *drived demand* dari permintaan output, yang berarti

permintaan akan input itu baru terjadi apabila ada permintaan akan output. Permintaan akan tenaga kerja dan jasa inilah yang melatarbelakangi berbagai perusahaan atau industri untuk berproduksi. Karena setiap perusahaan akan berupaya mencari profit dengan melihat peluang yang masuk kedalam suatu pasar.

Mengenai hal tersebut didukung oleh hasil riset yang dilakukan oleh (Indradewa & Natha, 2015) yang menjelaskan bahwa PDRB memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode 1994-2013. Itu artinya, naiknya PDRB akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. PDRB memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dengan anggapan apabila PDRB meningkat, maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Karena apabila nilai PDRB bertambah, maka jumlah nilai output ataupun penjualan dalam segala unit ekonomi di sesuatu wilayah akan bertambah. Semakin besar output ataupun penjualan yang dilakukan perusahaan, maka akan mendorong perusahaan untuk menaikkan tenaga kerja supaya produksinya bisa ditingkatkan guna mengejar kenaikan penjualan yang secara langsung bisa menambah penyerapan tenaga kerja. PDRB meningkat diakibatkan adanya investasi yang meningkat. Meningkatnya investasi berarti pendapatan aktivitas para usahawan yang diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja, dengan demikian maka banyak tenaga kerja yang terserap.

2.2.3 Hubungan Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Investasi memiliki peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, pembentukan modal menghasilkan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan

semakin memperluas kesempatan kerja (Todaro, 2000: 137-138, menurut jurnal Sulistiawati, 2015).

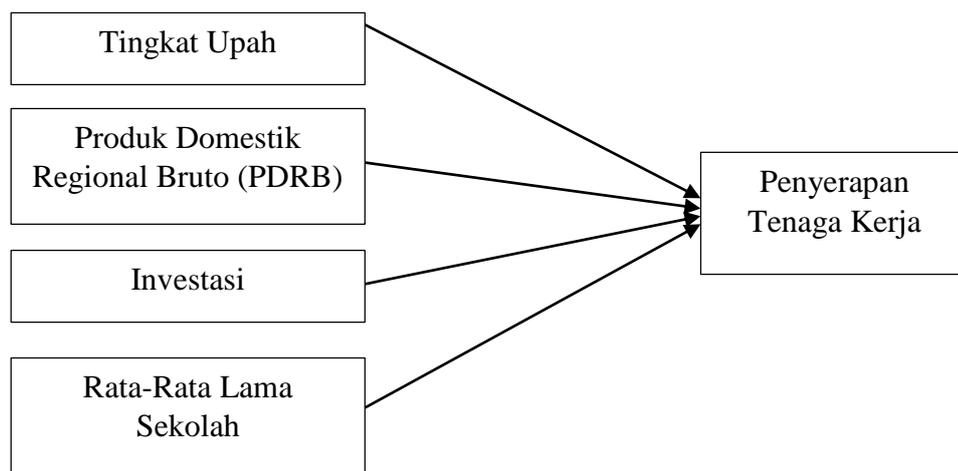
Hal ini didukung dengan hasil riset yang dilakukan oleh (Romdhoni, 2017) yang menyatakan bahwa investasi memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, artinya apabila investasi meningkat, maka peluang penyerapan tenaga kerja juga meningkat. Investasi memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Jika investasi mengalami kenaikan, maka aktivitas produksi barang-barang menjadi naik, maka akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dengan cara menambah jumlah orang untuk bekerja. Artinya banyak tenaga kerja yang akan terserap/bekerja. Jadi, Investasi memiliki pengaruh secara langsung terhadap penyerapan tenaga kerja, karena dengan adanya investasi, maka diperlukan tenaga kerja untuk merealisasikan investasi tersebut.

2.2.4 Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Simanjuntak (1998) dalam jurnal (Indradewa & Natha, 2015) mengatakan bahwa pendidikan dan latihan adalah salah satu faktor yang penting di dalam pengembangan sumber daya manusia. Rata-rata lama sekolah menunjukkan semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat disuatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah artinya semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang dijalani.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya et al., 2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada Provinsi Riau. Menurut hasil penelitian (Buchari, 2016) menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan

yang tinggi memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara langsung variabel pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Hindun, 2019). Rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rata-rata lama sekolah maka, tenaga kerja yang terserap semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena semakin lama pendidikan yang ditempuh, maka seseorang semakin maju wawasan dan pola berpikirnya, maka dapat meningkatkan daya saing, sehingga seseorang dengan pendidikan yang tinggi akan memiliki peluang besar untuk memasuki pasar kerja.



Gambar 2. 6 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis serta berdasarkan riset empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan riset di bidang ini, maka didapat hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga tingkat upah secara parsial berpengaruh negatif, sedangkan PDRB, investasi, dan rata-rata lama sekolah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2017-2021.
2. Diduga tingkat upah, PDRB, investasi, dan rata-rata lama sekolah secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2017-2021.